



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Indikator Kinerja Daerah adalah Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Daerah terdiri atas:
 - a. Indikator Kinerja Utama Daerah; dan
 - b. Indikator Kinerja Kunci Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indikator sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Indikator Kinerja Kunci Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah indikator Tujuan RPD, indikator sasaran RPD dan indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan acuan ukuran kinerja Daerah untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator Kinerja Kunci Daerah merupakan acuan ukuran kinerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan menetapkan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, indikator kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA, REVIU DAN EVALUASI KINERJA

Pasal 4

- (1) Perencanaan kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan untuk periode transisi 2 (dua) tahunan dan penyusunan perjanjian kinerja.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen RPD dan dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen tahunan yang merupakan perjanjian kinerja Bupati di tingkat Daerah dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan level eselon III dan eselon IV.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 5

- (1) Pengukuran Kinerja dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja disajikan dalam laporan kinerja tahunan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan ke Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Berdasarkan laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kewenangannya.
- (3) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Inspektorat kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 


ILHAM

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


FAUZAN HUSNIADI

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN 2025 - 2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Terwujudnya Produktivitas Ekonomi Bekelanjuta	1 Meningkatnya Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan	1.1 Persentase PDRB Sektor Unggulan	Akumulasi dari Distribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	Badan Pusat Statistik	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		1.2 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Nilai Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$	Persen	Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan Asli Daerah
2 Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja serta Perluasan Lapangan Berusaha	2 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	2.1 Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan	Seluruh Perangkat Daerah, Forum CSR, BAZNASDA dan Pemerintah Desa
		2.2 Nilai PDRB Perkapita	$\frac{\text{Nilai PDRB (ADHB)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Rp.Juta	Badan Pusat Statistik	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
	3 Menurunnya Pengangguran	3.1 Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Orang yang Tidak Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	Persen	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata
3 Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah	4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	4.1 Usia Harapan Hidup (UHH)	$\frac{\text{Jumlah Umur Semua Penduduk yang Meninggal}}{\text{Jumlah Penduduk yang Meninggal}}$	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan	Seluruh Perangkat Daerah
	5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	5.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$\text{RLS} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)}{P}$ dengan: P = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas L = Lama sekolah penduduk ke i = a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Mulai sekolah di SD sampai dengan XI = konversi kelas terakhir + kelas terakhir - 1 c. Mulai sekolah di S2, S3 = konversi kelas terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tidak pernah di kelas terakhir = konversi kelas terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak pernah di kelas terakhir = konversi kelas terakhir + kelas terakhir - 1	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
		5.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	$\text{HLS} = PK \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{P_i}$ Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah pada usia a di tahun t E _i = Partisipasi sekolah penduduk usia i pada tahun t P _i = Populasi penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a+1, ..., n) PK = Faktor koreksi parsialitas	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh Perangkat Daerah
6 Meningkatkan Infrastruktur Dasar	6.1 Persentase Infrastruktur Dasar yang Tersedia	Rata - Rata Akumulasi dari Persentase Jalan Mantap; Persentase Akses Air Minum Layak; Persentase Akses Sanitasi Layak; Persentase Prasarana Jaringan Irigasi	Persen	Dinas PUTR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PEJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH/ STAKEHOLDER PENDUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7 Meningkatnya Konektivitas Wilayah	7.1 Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	{Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek}^0,25	Persen	DPUTR, Disperindag, Dishub	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	8 Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	8.1 Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	Persen	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	9 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	9.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Kementerian PAN dan RB	Bappeda, Sekretariat Daerah, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
	10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	10.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Lombok Barat	Bappeda, Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
	11 Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	11.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan, pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD.	Indeks	Kementerian Dalam Negeri	BPKAD, Bappeda, Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
6 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	12 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	12.1 Indeks Kualitas Udara	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	Indeks	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat
		12.2 Indeks Kualitas Air Sungai	Nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	Indeks	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat
		12.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan	Indeks	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat
7 Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana	13 Meningkatnya Kemampuan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	13.1 Indeks Ketahanan Daerah	Ukuran kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kabupaten. IKD merupakan komponen penilaian untuk melihat seberapa tangguh atau kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana	Indeks	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,

 ILHAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025 - 2026

INDIKATOR KINERJA KUNCI DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN 2025 - 2026

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Terwujudnya produktivitas ekonomi berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan Ekonomi memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa, dengan rumus perhitungan:</p> $\frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100$ <p>PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t; PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelumnya.</p>	Persen	BPS	BAPENDA, DPMPSTP, DISPERINDAG, DISPERINDAG, DISKOP UKM, DIPERTA, DKP, DISNAKER, DISPAR,	INDIKATOR TUJUAN
2	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$	Persen	BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH	IKU
3	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Persentase PDRB Sektor Unggulan	Akumulasi dari Distribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	BPS	BAPENDA, DPMPSTP, DISPERINDAG, DISPERINDAG, DISKOP UKM, DIPERTA, DKP, DISNAKER, DISPAR,	IKU
4	Terwujudnya pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja serta perluasan lapangan berusaha	Persentase Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Persen	BPS	DINSOS, DUKCAPIL, DIKPANGAN	INDIKATOR TUJUAN
5	Terwujudnya pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja serta perluasan lapangan berusaha	Gini Rasio	$G = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i+1})$ <p>G = Ratio Gini f_i = Proporsi Rumah Tangga dlm Kls i X_i = Proporsi Jumlah Kumulatif RT dlm Kls i Y_i = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dlm Kls i</p>	Indeks	BPS	DISPERINDAG, DISKOP UKM, DIPERTA, DKP, DISNAKER, DISPAR, DIKPANGAN, DINSOS, DPMD, DP2KBPP3	INDIKATOR TUJUAN
6	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Ribu Jiwa	BPS	DINAS SOSIAL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN	IKU
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Nilai PDRB Perkapita (ADHK)	$\frac{\text{Nilai PDRB (ADHK)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Juta Rupiah	BPS	SELURUH PERANGKAT DAERAH	IKU
8	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	$PPP_j = \prod_{k=1}^m \left(\frac{P_{jk}}{P_{jk}^m} \right)^{1/m}$	Rp.(000)	BPS	DISPERINDAG, DISKOP UKM, DIPERTA, DKP, DISNAKER, DISPAR	KOMPONEN PEMBENTUK IPM
9	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	Persen	BPS	DISNAKER	IKU
ASPEK DAYA SAING DAERAH							

f

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
10	Terwujudnya peningkatan daya saing daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{keehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	Indeks	BPS	SELURUH PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN
11	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \cdot S_i}{\sum_{i=1}^n P_i}$	Tahun	BPS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IKU
12	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS = EK \times \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{E_i}$	Tahun	BPS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IKU
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	$P_t = P_0 + (b \cdot D) + (M - M_0)$	Tahun	BPS	DINAS KESEHATAN	IKU
14	Terwujudnya konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	Rata - rata dari Persentase Infrastruktur Dasar yang Tersedia; Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian; Persentase Rumah Layak Huni	Persen	BAPPEDA	DPUTR, DISHUB, DISPERKIM	INDIKATOR TUJUAN
15	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Infrastruktur Dasar yang Tersedia	Rata - Rata Akumulasi dari Persentase Jalan Mantap; Persentase Akses Air Minum Layak; Persentase Akses Sanitasi Layak, Persentase Prasarana Jaringan Irigasi	Persen	Dinas PUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IKU
16	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Wilayah Terhubung dengan Pusat Perekonomian	(Pasar Dapat Dilalui Roda 4*Objek Wisata Dapat Dilalui Roda 4*Pasar Memiliki Trayek*Objek Wisata Memiliki Trayek)^0,25	Persen	DPUTR, Disperindag, Dishub	DINAS PERHUBUNGAN	IKU
	Meningkatnya Infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase rumah layak huni	(Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah) x 100	Persen	Disperkim	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	IKU
17	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator yang menunjukkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan	Indeks	MENPAN RB	SEKRETARIAT DAERAH & SELURUH PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	Alat ukur dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah dengan melihat efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	Nilai	MENPAN RB	BAPPEDA, SEKRETARIAT DAERAH & INSPEKTORAT BESERTA SELURUH PERANGKAT DAERAH	IKU
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik melalui aplikasi SIKAT Lombok Barat	Indeks	BAPPEDA	BAPPEDA, SEKRETARIAT DAERAH BESERTA SELURUH	IKU
20	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu (Permendagri Nomor 19 Tahun 2020)	Indeks	KEMENDAGRI	BAPPEDA, BPKAD, SELURUH PERANGKAT DAERAH	IKU
ASPEK PELAYANAN UMUM							
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
23	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Rata-Rata Tingkat Iklim Keamanan, Inklusivitas dan Kebhinekaan Sekolah	Rata-Rata dari nilai indikator Tingkat Iklim Keamanan, Inklusivitas dan Kebhinekaan Sekolah yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas lingkungan belajar	Persen	DIKBUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						



NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
24	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	Angka Morbiditas	Jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu dikali 100%	Persen	DIKES	DINAS KESEHATAN	IKK
25		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah kunjungan total rawat jalan di fasilitas kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Persen	DIKES	DINAS KESEHATAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Meningkatnya Infrastruktur Dasar							
26	Meningkatnya Prasarana Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Saluran Irigasi Kabupaten}} \times 100$	Persen	DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IKK
27	Meningkatnya Akses Air Minum Aman	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	Persen	DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IKK
28	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	Persen	DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IKK
29	Meningkatnya Pengendalian dan	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Persen	DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IKK
30	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik + Sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Persen	DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman							
31	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	(Rumah tdk layak huni yg ditangani/ seluruh rumah tidak layak huni) x 100 %	Persen	DISPERKIM	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	IKK
32		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	(Luasan Kawasan kumuh tertangani / Luas seluruh kawasan kumuh yang di tetapkan) x 100	Persen	DISPERKIM	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
33	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada + Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada + Persentase Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat + Persentase Unjuk Rasa + Persentase Linmas Perjumlah Penduduk + Persentase Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol PP}}{6}$	Persen	SATPOL PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	IKK
Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana							
34	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Seluruhnya}}{\text{Jumlah Desa Yang dibentuk}} \times 100$	Persen	BPBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	IKK

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
35	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan (Non Kebakaran)	Persentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan sesuai Response Time	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	Persen	DISDAMKAR	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
Menurunnya Angka Kemiskinan							
36	Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	$\% \text{ PMKS} = \frac{\text{Juml PMKS Yg Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS Yg Ada}} \times 100 \%$	Persen	DINSOS	DINAS SOSIAL	IKK
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
Menurunnya pengangguran							
37	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja}} \times 100$	Persen	DISNAKER	DINAS TENAGA KERJA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat							
38	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{\text{Rasio IPM Laki-laki}}{\text{Rasio IPM Perempuan}} \times 100$	Persen	DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKK
39		Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terdapat 31 indikator penilaian KLA oleh kementerian PPPA yang nilai maksimalnya berjumlah 1000 dan ada 5 kluster penilaian : kluster I (Hak sipil Kebebasan), Kluster II (Lingkungan Keluarga dan Alternatif Pengasuhan), Kluster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Kluster IV (Pendidikan, Kemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), Kluster V (Perlindungan Khusus)	Persen	DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat							
40	Menurunkan Angka Kelahiran Total	Persentase Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	$\frac{\text{Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun dalam pertengahan periode yang sama}} \times 1000$	Persen	DP2KBP3A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
Menurunnya angka Kemiskinan							
41	Meningkatnya Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan serta	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor PPH Kelompok padi-padian +...+ skor PPH Kelompok Lain-lain	Poin	DIKPANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah							

f

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
42	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Mutu Udara Ambien	$I = \frac{I_a - I_b}{X_a - X_b} (X_s - X_b) + I_b$ <p>Dimana, I = ISPU terhitung Ia = ISPU batas atas Ib = ISPU batas bawah Xa = Konsentrasi ambien batas atas (µg/m³) Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (µg/m³) Xs = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (µg/m³)</p>	Indeks	DLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	IKK
43	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas pH (Potential Hydrogen) dan BOD (Biological Oxygen Demand) air sungai.	<p>setiap titik akan memiliki Indeks Pencemaran Air melalui persamaan:</p> $IP_s = \sqrt{\frac{(C_1/L_1) + (C_2/L_2) + \dots}{2}}$ <p>Dimana L₁ : Konsentrasi Baku Peruntukan A1 (B) C₁ : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (B) IP_s : Pencemaran bagi persatuan (B) IP₁ : (C₁/L₁, C₂/L₂,...) (C₁/L₁)Maksimum : Nilai maksimum dari C₁/L₁ (C₁/L₁)Rata-rata : nilai rata-rata dari C₁/L₁ menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. 0 < IP_s < 1,0 : baik (memenuhi baku mutu) b. 1,0 < IP_s < 5,0 : cemar ringan c. 5,0 < IP_s < 10,0 : cemar sedang d. IP_s > 10,0 : cemar berat</p>	Indeks	DLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	IKK
44	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi Non Hutan	<p>Keterangan TL = Tutupan Lahan LH = Luas tutupan hutan Lh = Luas belukar di kawasan hutan Lhapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> <p>TL = (LH + Lhapl + Lrth) / LW</p>	Indeks	DLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
Menurunnya Angka Kemiskinan							
45	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Adminduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100$	Persen	DISDUKCAPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Menurunnya Angka Kemiskinan							
46	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan pemerintah desa	Peningkatan jumlah desa mandiri	$IDM = 1/3 (IS+IE+IL)$ <p>Data dari 54 indikator dengan skor (0-5) sesuai tingkat keberartian kemudian dirumuskan menjadi 3 indeks yaitu Indeks Sosial (IS), Indeks Ekonomi (IE) dan Indeks Lingkungan (IL) lalu dihitung menjadi Indeks Desa Membangun dengan Rumus. Dari IDM yang dimiliki diketahui status kemajuan dan kemandirian desa, sehingga bisa diketahui jumlah desa mandiri.</p>	Desa	DPMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
Meningkatnya Konektivitas dan akses antar wilayah							
47	Meningkatnya cakupan wilayah terhubung dengan jaringan transportasi lokal yang berkeselamatan	persentase jaringan trayek pedesaan yang terhubung dengan moda transportasi	$\frac{\text{jumlah jaringan trayek aktif}}{\text{jumlah trayek di wilayah kabupaten Lombok Barat}} \times 100$	Persen	DISHUB	DINAS PERHUBUNGAN	IKK
48		persentase rute pelayaran yang dilayani pada pelabuhan pengumpan lokal	$\frac{\text{jumlah rute pelayaran yang dilayani pada tahun n}}{\text{jumlah rencana rute pelayaran}} \times 100$	Persen	DISHUB	DINAS PERHUBUNGAN	IKK

ff

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
49	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Penilaian Komisi Informasi NTB	Predikat	DISKOMINFO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IKK
50	Meningkatnya Kematangan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City	Indeks Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB	Indeks	DISKOMINFO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IKK
51		Indeks Kematangan Smart City	Hasil penilaian oleh Kementerian Kominfo	Indeks	DISKOMINFO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor UMKM							
52	Meningkatnya UMKM dan Wirausaha yang berdaya saing dan produktif	Pertumbuhan Wirausaha yang bertransformasi dari Informal ke Formal	$x = \frac{\text{jumlah UKM Formal}}{\text{jumlah UKM Non Formal}} \times 100\%$	Persen	DISKOP UKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	IKK
Menurunnya Angka Kemiskinan							
53	Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	$x = \frac{\text{Koperasi Sehat} + \text{Cukup Sehat}}{\text{Koperasi Aktif}} \times 100\%$	Persen	DISKOP UKM	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
Meningkatnya Realisasi Investasi							
54	Meningkatkan Iklim Investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Investasi	$\frac{\text{Total realisasi PMA dan PMDN tahun } n \text{ Kabupaten}}{\text{Target realisasi Kabupaten Lombok Barat PMA dan PMDN tahun } n} \times 100$	Persen	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan							
55	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	$\frac{\text{jumlah organisasi pemuda yg aktif}}{\text{jumlah organisasi pemuda}} \times 100$	Persen	DISPORA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	IKK
56		Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	$\frac{\text{jumlah Atlet yg berprestasi}}{\text{jumlah atlet di Lombok Barat}} \times 100$	Persen	DISPORA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
57	Meningkatnya penyalenggaraan statistik sektoral	Persentase Ketersediaan data sektoral	$\frac{\text{jumlah form yang terisi}}{\text{jumlah total form yang ada}} \times 100$	Persen	DISKOMINFO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IKK
58		Persentase Ketersediaan data sektoral yang berkualitas	$\frac{\text{jumlah data yang berkualitas}}{\text{jumlah data yang tersedia}} \times 100$	Persen	DISKOMINFO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
59	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{jumlah nilai per OPD}}{\text{area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian}} \times 100$	Persen	DISKOMINFO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata							
60	Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah didaftar}} \times 100$	Persen	DIRBUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IKK

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
61	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Objek Cagar Budaya yang telah terdaftar}} \times 100$	Persen	DIKBUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan							
62	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{\text{IPLM1+IPLM2+IPLM3+IPLM4+IPLM5+IPLM6+IPLM7}}{\text{Jumlah Peduduk}} \times 100$	Indeks	DISARPUS	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
63	Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Indeks Pengelolaan Arsip	$\frac{\text{Jumlah Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100$	Persen	DISARPUS	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	IKK
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perikanan							
64	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	$\frac{\text{Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan tahun n} - \text{Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan n-1}}{\text{Jumlah pengolahan hasil perikanan tahun n-1}} \times 100$	Persen	BKP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	IKK
65		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n} - \text{Jumlah produksi perikanan budidaya n-1}}{\text{Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n-1}} \times 100$	Persen	DKP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	IKK
66		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n} - \text{Jumlah produksi perikanan tangkap n-1}}{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1}} \times 100$	Persen	DKP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pariwisata							
67	Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata	Lama tinggal wisatawan (Length of stay)	$\frac{\text{Total lama tinggal}}{\text{Jumlah wisatawan}}$	Hari	DISPAR	DINAS PARIWISATA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pertanian							
68	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	$\frac{\text{Produksi pertanian tahun n} - \text{produksi pertanian n-1}}{\text{produksi pertanian tahun n-1}} \times 100$	Persen	DISPAR	DINAS PARIWISATA	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
Meningkatnya Nilai Tambah Industri dan Perdagangan							
69	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Usaha Pedagang	$\frac{\text{Jumlah Pedagang/Pengusaha yang dibina}}{\text{Jumlah Pedagang/Pengusaha di Lombok Barat}} \times 100$	Persen	DISPERINDAG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
Meningkatnya Nilai Tambah Industri dan Perdagangan							
70	Meningkatnya Nilai Tambah Industri	Persentase Pertumbuhan Pada Sektor Industri	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun (n)} - \text{Jumlah IKM (n-1)}}{\text{jumlah IKM (n-1)}} \times 100$	Persen	DISPERINDAG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	IKK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
Menurunnya Pengangguran							
71	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Kerja	Persentase transmigran yang dikirim	$\frac{\text{jumlah transmigran yang dikirim}}{\text{jumlah target transmigran}} \times 100$	Persen	DISNAKER	DINAS TENAGA KERJA	IKK
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH							

4

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
Meningkatnya akuntabilitas kinerja							
72	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)		Indeks	SETDA	SEKRETARIAT DAERAH	IKK
SEKRETARIAT DPRD							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
73	Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok	Persentase Anggota DPRD yang Puas Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	$x = \frac{\text{jumlah anggota DPRD yang puas dengan pelayanan sekretariat DPRD}}{\text{jumlah seluruh anggota DPRD}} \times 100\%$	Persen	SETWAN	SEKRETARIAT DPRD	IKK
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
PERENCANAAN							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja							
74	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Hasil capaian penilaian AKIP Kabupaten Lombok Barat Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai	KEMENPAN RB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IKK
75		Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Nasional Dan Provinsi	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021	Persen	BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IKK
76		Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPd Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD	Jumlah Prioritas Pembangunan RKPd yang sesuai dengan RPJMD tahun n $\times 100$ Jumlah Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun berkenaan	Persen	BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IKK
77	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKU) Daerah	$\frac{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Daerah yg tercapai th.n}}{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Daerah th.n}} \times 100$	Persen	BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	IKK
KEUANGAN							
Meningkatnya Penerimaan PAD							
78	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	$\frac{\text{Total Penerimaan Pajak}}{\text{Total PAD}} \times 100$	Rupiah	BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH	IKK
79	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak	Indeks Kepuasan Wajib Pajak	Pengolahan dengan Komputer dan Pengolahan secara manual	Indeks	BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH	IKK
Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah							
80	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu (Permendagri Nomor 19 Tahun 2020)	Indeks	KEMENDAGRI	BAPPEDA, BPKAD, SELURUH PERANGKAT DAERAH	
KEPEGAWAIAN							
Meningkatnya Profesionalisme ASN							
81	Meningkatnya Manajemen ASN	Angka dimensi Kinerja ASN	Penilaian BKN	Angka	BKN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Meningkatnya Profesionalisme ASN							
82	Meningkatnya Kualitas ASN	Angka Kompetensi ASN	Penilaian BKN	Angka	BKN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja							

NO	ASPEK/ BIDANG URUSAN/ TUJUAN DAERAH/ SASARAN STRATEGIS DAERAH/ SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	PENJELASAN/RUMUS PENGHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
83	Terimplementasinya Rekomendasi Hasil Riset Dan Inovasi Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Riset Dan Inovasi Yang Dimanfaatkan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan tahun ke n}}{\text{Jumlah target hasil riset dan inovasi}} \times 100$	Persen	BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja							
84	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	$\frac{\text{Capaian Bobot Indikator}}{\text{Bobot Indikator}} \times 100\%$	Persen	BPKP	INSPEKTORAT	
85		Kapabilitas APIP	$\frac{\text{Capaian Bobot Indikator}}{\text{Bobot Indikator}} \times 100\%$	Persen	BPKP	INSPEKTORAT	
86		Level SPIP	$\frac{\text{Capaian Bobot Indikator}}{\text{Bobot Indikator}} \times 100\%$	Persen	BPKP	INSPEKTORAT	
G. UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
87	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik melalui aplikasi SIKAT Lombok Barat	Indeks	APLIKASI SIKAT	KECAMATAN	
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
88	Terjaganya Stabilitas Daerah	Persentase kasus konflik SARA yang berhasil dicegah	$\frac{\text{Jumlah konflik sara yang tertangani}}{\text{jumlah konflik sara yang terjadi}} \times 100$	Persen	BAKESBANGPOL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,

 ILHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN
2025-2026

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: _____

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025-2026

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor ____ Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 - 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama (NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (NAMA PERANGKAT DAERAH), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala (NAMA PERANGKAT DAERAH) ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2025-2026.
- KETIGA : Pengukuran dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dilakukan oleh Sub Bagian Program pada Sekretariat (NAMA PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada Bupati, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala (NAMA PERANGKAT DAERAH) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal:

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Nama
Pangkt/Gol Ruang
Nip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
NOMOR: / /
TANGGAL
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2025-2026

TUGAS DAN FUNGSI (NAMA PERANGKAT DAERAH)

A. TUGAS : Sesuaikan PERBUP Tugas dan Fungsi PD

B. FUNGSI : Sesuaikan PERBUP Tugas dan Fungsi PD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Nama
Pangkt/Gol Ruang
Nip.